

Research article

Politik Modern Turki: Sekularisme, Islamisme, dan Perbandingan Atatürk dan Erdoğan

Modern Turkish Politics: Secularism, Islamism, and a Comparison of Atatürk and Erdoğan

Abdullah Mufid Mubarrok¹, Rubaidi^{2*}, & Mohammad Sholeh³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

* abdullahmufidm@gmail.com

Abstract

This article examines the historical and political dynamics between secularism and Islamism in the context of modern Turkey, with a focus on two central figures: Mustafa Kemal Atatürk and Recep Tayyip Erdoğan. Atatürk, as the founder of the Republic of Turkey, established the foundations of the state based on principles of secularism and Western modernism, including the abolition of the Caliphate and reforms in law, education, and public symbols. In contrast, Erdoğan and the Justice and Development Party (AKP) have integrated Islam into national identity through policy reforms, education, and historical discourse. Drawing on perspectives from the politics of religion and political sociology, and employing conceptual frameworks such as Public Religion and Political Islam, this article adopts a qualitative research approach based on library research and Norman Fairclough's critical discourse analysis to trace the relationship between discourse, power, and the construction of national identity, as well as the ideological dynamics between secular and religious groups in Turkey's contemporary public sphere. The findings indicate that despite their differing approaches to religion, both Atatürk and Erdoğan employed centralized and symbolic forms of power to shape national narratives. This study contributes to a deeper understanding of state-religion relations in the politics of the modern Muslim world, offering a critical reflection on the future of democracy, pluralism, and religious freedom in Turkey.

Keywords

Atatürk; Erdoğan; Islamism; Religious Politics; Secularism; Turki.

Article history

DDMMYY | Submitted: 06/05/2025; revised: 25/11/2025; accepted: 24/12/2025.



© 2025 by the author(s). This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai posisi agama dalam kehidupan bernegara terus menjadi isu sentral dalam dinamika politik dan sosial di Turki. Negara ini memiliki sejarah yang kompleks dalam menyeimbangkan antara warisan Islam dan modernitas Barat. Di satu sisi, Turki adalah pewaris kekhalifahan Islam Utsmaniyah yang mengakar selama lebih dari enam abad; di sisi lain, Turki juga merupakan negara republik sekular yang lahir melalui reformasi radikal yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923 (Zürcher, 2017).

Sekularisme versi Turki (*laiklik*), secara historis tidak hanya menandai pemisahan agama dari negara, tetapi juga mencerminkan upaya negara untuk mengontrol ekspresi keagamaan dalam ruang publik. Pendekatan ini berbeda dari sekularisme liberal di Barat yang lebih menekankan netralitas negara. Di Turki, negara secara aktif mengatur institusi agama melalui lembaga seperti Diyanet (Kuru, 2009).

Namun, sejak awal tahun 2000-an, arah politik Turki mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Pemerintahan Erdoğan banyak menekankan pada nilai-nilai keislaman dalam kebijakan publik, menantang dominasi ideologi sekular yang diwariskan dari era Atatürk (White, 2014). Hal ini menimbulkan ketegangan ideologis yang tidak hanya mempengaruhi ranah politik, tetapi juga aspek-aspek kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan di Turki. Perdebatan antara sekularisme dan Islamisme di Turki bukan sekadar pertarungan antara dua paham ideologis, tetapi juga menjadi simbol dari tarik-menarik antara Barat dan Timur, antara modernitas dan tradisi. Fenomena ini menjadikan Turki sebagai studi kasus yang penting dalam memahami relasi antara agama dan negara di dunia Muslim kontemporer (Yavuz, 2009).

Atatürk memainkan peran fundamental dalam membentuk identitas negara Turki modern. Melalui serangkaian reformasi struktural, ia berusaha menghapus jejak kekhalifahan dan menggantinya dengan tatanan negara-bangsa yang rasional, nasionalis, dan sekular. Reformasi ini mencakup penghapusan lembaga keagamaan seperti Khilafah dan madrasah, adopsi hukum sipil Eropa, serta pelarangan simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik (Ahmad, 1993). Atatürk juga menciptakan fondasi ideologis yang disebut sebagai Kemalisme, yang terdiri dari enam prinsip utama: republikanisme, nasionalisme, populisme, statisme, sekularisme, dan reformisme. Sekularisme dalam konteks ini bersifat doktriner dan menjadi alat untuk membentuk warganegara yang loyal terhadap negara (Zürcher, 2017).

Sebaliknya, Erdoğan muncul sebagai figur politik yang membangun basis kekuasaannya melalui penguatan identitas Islam di tengah masyarakat. Ia memanfaatkan ketidakpuasan terhadap elit sekular dan memainkan narasi keadilan sosial berbasis nilai-nilai Islam untuk menarik dukungan rakyat (Kadioğlu, 2005). Secara bertahap, Erdoğan berhasil meminggirkan pengaruh militer, yang selama ini menjadi penjaga ideologi sekular, dan memperluas kekuasaan eksekutif (Özpek & Park, 2019). Pengaruh Erdoğan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga simbolik dan kultural. Ia berhasil menciptakan narasi “Neo-Ottomanisme” yang mengidealisasi masa lalu kejayaan Islam, sekaligus mengkritik warisan Atatürk yang dianggap terlalu condong ke Barat. Narasi ini memiliki dampak besar dalam mengubah lanskap ideologis dan identitas nasional Turki.

Dalam konteks perubahan ideologis dan sosial yang mewarnai sejarah politik Turki, penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana konstruksi negara dan identitas nasional dibentuk melalui dua pendekatan yang bertolak belakang: sekularisme ala Mustafa Kemal Atatürk dan Islamisme politik yang dibawa oleh Recep Tayyip Erdoğan. Perbedaan keduanya bukan hanya terletak pada aspek simbolik atau naratif, tetapi juga tampak nyata dalam kebijakan publik, pengaturan relasi negara dan agama, serta pengaruhnya terhadap masyarakat sipil, pendidikan, dan demokrasi. Atatürk meletakkan fondasi negara bangsa sekuler dengan memisahkan institusi keagamaan dari kekuasaan negara melalui reformasi radikal (Yavuz, 2020). Sementara Erdoğan secara bertahap membalikkan sebagian besar warisan sekular tersebut dengan memulihkan peran simbolik dan praktis Islam dalam kehidupan publik dan pemerintahan (White, 2014). Transisi ini bukan sekadar perubahan rezim politik, melainkan menyangkut transformasi ideologis yang memengaruhi arah masa depan Turki.

Selain dua figur sentral tersebut, dinamika hubungan antara sekularisme dan Islamisme di Turki juga dipengaruhi oleh peran aktor-aktor sosial lain yang beragam, sehingga analisis perlu menempatkan aktor-aktor non-negara sebagai ko-produsen arah relasi agama–negara di Turki. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa gerakan progresif dan organisasi masyarakat sipil kerap berfungsi sebagai “penyeimbang” yang secara aktif mendorong agenda demokratisasi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender (Öniş, 2006; Esen & Gumuscu, 2025), terutama sebagai respons terhadap pemusatan kekuasaan negara, baik dalam tradisi Kemalis maupun di era AKP. Selanjutnya, kelompok minoritas religius—seperti komunitas Alevi dan Kristen—mengalami dampak kebijakan yang ambivalen: pelebaran partisipasi simbolik di satu sisi, namun di sisi lain, institusionalisasi agama melalui Diyanet dan politisasi simbol

(misalnya Neo-Ottomanisme) justru memperkuat eksklusivitas dan hierarki kewargaan (Kuru, 2009; Kaya, 2020).

Selain itu, ranah kebijakan pendidikan dan budaya menjadi medan pertempuran, di mana perubahan kurikulum serta regulasi moral negara membentuk horizon normatif generasi muda, memicu resistensi dan artikulasi wacana tandingan di ruang digital dan akademik (Özsoy, 2018; Tuğal, 2009). Bahkan di kancah internasional, penggunaan agama sebagai sumber legitimasi eksternal turut mengkonsolidasikan narasi domestik (Yavuz, 2009; Yenigun, 2021). Dengan demikian, medan pertarungan antara sekularisme dan Islamisme tidak semata ditentukan oleh Atatürk dan Erdoğan, melainkan dinegosiasikan terus-menerus oleh koalisi aktor sosial yang beragam dan sering kali saling berkompetisi, menggarisbawahi kompleksitas relasi agama-negara yang bergerak melampaui figur elit politik.

Bertolak dari dinamika tersebut, artikel ini merumuskan empat pertanyaan kunci yang akan menjadi dasar eksplorasi analitis. *Pertama*, apa karakteristik utama dari sekularisme Atatürk, dan bagaimana ideologi tersebut diimplementasikan dalam kebijakan negara pada era awal Republik Turki? *Kedua*, bagaimana Erdoğan membingkai Islam dalam proyek politik dan pemerintahannya, serta sejauh mana Islam menjadi instrumen untuk konsolidasi kekuasaan dan legitimasi sosial-politik? *Ketiga*, apa dampak dari pergeseran ideologis ini terhadap masyarakat, institusi negara, dan konsolidasi demokrasi Turki? Dan *terakhir*, bagaimana kontinuitas maupun diskontinuitas antara dua rezim ini menjelaskan wajah Turki kontemporer yang berada di persimpangan antara tradisi kemalis dan aspirasi Islamisme modern?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dua paradigma ideologis yang mendasar dalam sejarah politik modern Turki. Analisis difokuskan pada bagaimana sekularisme dan Islamisme sebagai ideologi negara membentuk kebijakan, memengaruhi struktur institusional, dan menentukan relasi antara negara dan agama. Kajian ini juga menyoroti bagaimana kedua pendekatan tersebut membentuk persepsi terhadap identitas nasional Turki, termasuk bagaimana wacana keagamaan dipolitisasi dalam narasi pembangunan bangsa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat perubahan sebagai proses linier, tetapi juga menekankan adanya kompleksitas, ketegangan, dan tumpang tindih antara dua rezim ideologis yang berpengaruh besar dalam sejarah Turki modern.

Ruang lingkup kajian mencakup periode awal Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk (1923–1938) dan masa pemerintahan Recep

Tayyip Erdoğan sejak 2003 hingga saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, serta menerapkan analisis wacana kritis model Norman Fairclough untuk menelusuri relasi antara bahasa, kekuasaan, dan pembentukan identitas nasional dalam wacana politik kedua tokoh tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan sosiologis guna memahami dinamika ideologis antara sekularisme dan Islamisme yang tercermin dalam kebijakan, narasi publik, dan simbol-simbol kenegaraan.

Tujuannya bukan untuk menilai benar atau salah dari masing-masing ideologi, tetapi untuk menggambarkan proses historis dan politik yang membentuk pergeseran identitas Turki dari sekularisme menuju Islamisme, serta bagaimana ketegangan antara keduanya memengaruhi wajah Turki kontemporer sebagai negara demokrasi yang plural namun sarat konflik identitas. Dengan memahami kedua kutub ideologis ini secara kritis, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang politik identitas keagamaan di Turki dalam lintasan sejarah panjangnya.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan teknik analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Pendekatan yang digunakan bersifat politik dan sosiologis, karena berupaya memahami relasi ideologis dalam konteks sosial-politik Turki yang kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi data kuantitatif semata (Creswell & Creswell, 2017). Melalui studi pustaka, penelitian ini menelusuri berbagai teks dan sumber sekunder yang relevan, seperti literatur akademik, dokumen kebijakan negara, pidato resmi, arsip media massa, serta publikasi lembaga-lembaga seperti *Diyanet* dan *think tank* Turki. Penggunaan sumber-sumber ini memungkinkan analisis yang kaya terhadap konstruksi wacana sekularisme Atatürk dan Islamisme Erdoğan, yang mencerminkan pergeseran paradigma ideologis negara modern Turki (Esen & Gumuscu, 2025; Ugur-Cinar, 2023).

Teknik analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkap bagaimana narasi sekularisme dan Islamisme dikonstruksi, direproduksi, serta dinegosiasikan dalam ruang publik dan institusi negara. Penelitian ini mengacu pada model Norman Fairclough (1995) yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang sarat relasi kuasa dan ideologi. Pendekatan Fairclough memungkinkan pembacaan teks secara tiga dimensi — meliputi dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial — guna mengidentifikasi hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Jorgensen &

Phillips, 2002). Dalam konteks ini, pidato Atatürk dan Erdoğan dianalisis bukan sekadar sebagai representasi linguistik, tetapi juga sebagai strategi hegemonik yang membentuk kesadaran kolektif bangsa Turki. Wacana sekularisme Atatürk dilihat sebagai bagian dari proyek modernitas dan baratisasi, sedangkan Islamisme Erdoğan dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap warisan elitisme sekular melalui simbolisasi religius dalam politik identitas (Ozturk, 2021).

Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan beberapa kerangka konseptual yang saling melengkapi. *Pertama*, teori “*public religions*” dari José Casanova (1994) digunakan untuk memahami dinamika agama yang tidak lagi terbatas pada ranah privat, tetapi justru kembali ke ruang publik sebagai aktor politik. *Kedua*, gagasan Olivier Roy (2004) tentang “*political Islam*” membantu menjelaskan transformasi Islamisme dari gerakan sosial menjadi instrumen kekuasaan negara. Dan *ketiga*, konsep “*imagined communities*” dari Benedict Anderson (2006) digunakan untuk menganalisis bagaimana identitas nasional dan simbol kebangsaan dikonstruksi melalui narasi sejarah dan ideologis. Untuk memperkuat analisis kontemporer, penelitian ini juga merujuk pada studi Kirdiş (2023) mengenai politik religius di bawah kepemimpinan AKP serta analisis Çinar (2005; 2011; dan 2014) tentang *authoritarian secularism* dan bentuk resistensinya di era Erdoğan.

Dengan mengintegrasikan kerangka teoritis dan metode analisis ini, penelitian ini tidak hanya membandingkan dua sosok historis, tetapi juga membedah perubahan struktur ideologis negara yang berdampak luas terhadap kehidupan warga. Analisis tidak terbatas pada dimensi eksplisit teks, tetapi juga melibatkan pembacaan terhadap simbol-simbol politik, kebijakan publik, dan regulasi yang merepresentasikan pergeseran epistemologis dalam relasi agama dan negara. Pendekatan sintesis ini memungkinkan pembacaan yang mendalam terhadap kontinuitas dan diskontinuitas ideologi antara rezim Atatürk dan Erdoğan, serta menawarkan pemahaman yang lebih holistik tentang arah ideologis Turki di tengah arus globalisasi dan kebangkitan populisme religius (Esen & Gumuscu, 2025; Yavuz, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kemunculan Sekularisme di Turki (Era Atatürk)

Sekularisme merupakan konsep multidimensi yang tidak dapat direduksi semata-mata pada pemisahan antara institusi agama dan negara. Ia mencakup dimensi politik, kultural, dan historis yang saling terkait. Dalam konteks studi sosial-politik

kontemporer, sekularisme tidak lagi dipahami sebagai sebuah model tunggal, melainkan sebagai spektrum praktik yang berbeda di tiap negara (Casanova, 1994). Casanova membedakan antara sekularisme politik, yang mengacu pada pemisahan institusional agama dan negara, dengan sekularisme sosial, yaitu proses menurunnya pengaruh agama dalam kehidupan publik dan individu. Dalam prakteknya, negara-negara mengadopsi model sekularisme yang berbeda-beda. Di Prancis, prinsip *laïcité* menegaskan eksklusi ketat agama dari ruang publik, sedangkan di Amerika Serikat, sekularisme bersifat lebih pasif dan protektif terhadap kebebasan beragama selama tidak mengganggu institusi negara. Di India, sekularisme menampilkan karakter pluralistik di mana negara memfasilitasi berbagai agama secara relatif setara.

Khusus dalam konteks Turki, sekularisme memiliki karakteristik yang unik dan sering disebut sebagai *assertive secularism*, yakni bentuk sekularisme yang aktif dan bahkan agresif dalam membatasi ruang gerak agama dalam domain publik (Kuru, 2009). Warisan Kemalisme memosisikan sekularisme sebagai fondasi negara modern yang harus dijaga dari pengaruh konservatisme religius, dengan cara-cara yang seringkali otoriter. Negara bukan hanya menjaga netralitas agama, tetapi juga mengontrol ekspresi keagamaan melalui institusi seperti *Diyanet* (Direktorat Urusan Agama) yang paradoksnya justru menjadi alat negara dalam mengatur praktik keagamaan warga. Hal ini menciptakan relasi yang problematis antara negara dan masyarakat, di mana sekularisme dipersepsikan bukan sebagai prinsip kebebasan, tetapi sebagai instrumen hegemonik elite sekular terhadap mayoritas Muslim. Dengan demikian, sekularisme di Turki tidak sekadar menyangkut relasi negara dan agama, tetapi juga mencerminkan ketegangan antara identitas elite dan rakyat, antara modernitas dan tradisi, serta antara nasionalisme dan Islam (Ugur-Cinar, 2023; White, 2014).

Di sisi lain, Islamisme muncul sebagai respon terhadap proses sekularisasi dan modernisasi yang dianggap mengabaikan identitas kultural dan spiritual masyarakat Muslim. Islamisme adalah ekspresi politik dari Islam yang bertujuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam tatanan kenegaraan dan hukum, meskipun ekspresi ini sangat beragam dalam bentuk dan intensitasnya (Roy, 2017). Islamisme modern tidak muncul dalam ruang hampa; ia lahir dari kekecewaan terhadap kolonialisme, ketimpangan sosial, serta kegagalan negara-negara sekular dalam mewujudkan keadilan dan moral publik. Dalam konteks Turki, Islamisme tumbuh subur sebagai reaksi terhadap marginalisasi kelompok religius oleh sistem Kemalis yang sekular dan elitis. Partai-partai seperti Refah dan kemudian AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) mengembangkan bentuk Islamisme elektoral yang menggunakan

bahasa demokrasi, HAM, dan pluralisme untuk memperjuangkan aspirasi keislaman dalam bingkai legalisme konstitusional (Kirdiş, 2023; Yavuz, 2009).

Perlu dicatat bahwa Islamisme tidak identik dengan fundamentalisme atau radikalisme. Di Turki, banyak kelompok Islamis justru mengadopsi strategi moderat dan pragmatis, bahkan merangkul nilai-nilai demokrasi dan ekonomi pasar untuk menarik dukungan publik. Kecenderungan inklusif dalam gerakan *Milli Görüş*, misalnya, dapat dipahami sebagai strategi ideologis yang berakar pada dinamika sosial-politik Turki pasca-hegemoni sekularisme Kemalis. Inklusivitas ini tidak semata-mata mencerminkan nilai teologis Islam, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap tuntutan modernitas dan demokrasi agar Islamisme dapat diterima dalam ruang publik yang sekuler. Melalui bahasa politik yang menekankan “modernitas,” “kemajuan,” dan “demokrasi,” gerakan ini berupaya menampilkan wajah Islam yang rasional dan terbuka, sekaligus menurunkan resistensi dari kelompok sekuler dan memperluas legitimasi di tingkat internasional. Dengan demikian, inklusivitas tersebut dapat dibaca sebagai strategi politik untuk membangun hegemoni baru—yakni meneguhkan kembali nilai-nilai Islam dalam format wacana yang selaras dengan logika modernitas, tanpa menanggalkan orientasi ideologis Islamisme yang menjadi basis gerakan ini (Fairclough, 2023; White, 2014; Yavuz, 2009). Islamisme dalam konteks ini tidak semata sebagai bentuk konservatisme, melainkan sebagai upaya rekonstruksi modernitas berdasarkan prinsip Islam, yang kerap disebut sebagai “modernisme Islam.” Ini terlihat dalam penggunaan teknologi, media sosial, institusi modern, bahkan retorika HAM untuk menyuarakan agenda keislaman (Bayat, 2007; Esen & Gumuscu, 2025). Dengan demikian, Islamisme tidak hanya merupakan ekspresi religius, tetapi juga strategi politik dan kultural untuk membentuk ulang ruang publik berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penting untuk membedakan antara Islam sebagai agama privat dan transenden, dengan Islamisme sebagai proyek politik yang bersifat duniawi dan kontekstual. Perbedaan ini seringkali diabaikan dalam diskursus publik, sehingga menghasilkan polarisasi yang tajam antara kelompok sekular dan religius. Kesalahan dalam membedakan keduanya dapat menimbulkan ketegangan dalam kebijakan negara maupun persepsi publik terhadap agama. Di Turki, ketegangan ini diperparah oleh tindakan represif negara terhadap simbol dan ekspresi keagamaan, seperti pelarangan jilbab di institusi negara dan universitas pada era 1980–1990-an. Kebijakan semacam ini bukan hanya membatasi hak-hak individu, tetapi juga memperdalam jarak antara elite sekular dan masyarakat Muslim konservatif, yang pada akhirnya memperkuat basis politik bagi gerakan Islamis (Ozturk, 2021; Yavuz, 2020).

Secara keseluruhan, dinamika antara sekularisme dan Islamisme di Turki harus dipahami dalam konteks historis, sosial, dan ideologis yang kompleks. Sekularisme Turki bukan sekadar proses netralisasi agama, melainkan juga proyek rekayasa identitas nasional yang berusaha menggantikan simbol-simbol Islam dengan nilai-nilai modernitas Barat. Sementara itu, Islamisme bukan sekadar kebangkitan religius, melainkan bentuk kontestasi terhadap model modernitas sekular yang dianggap eksklusif dan tidak merepresentasikan identitas mayoritas. Fenomena ini menempatkan Turki sebagai medan tarik-menarik yang intens antara dua kutub ideologis besar, sekaligus mencerminkan tantangan kontemporer dalam mengelola pluralisme agama dan politik di era modern.

Kemunduran Kesultanan Utsmaniyah sejak abad ke-17 mencapai puncaknya pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Tekanan internal seperti melemahnya struktur politik dan militer diperparah oleh tantangan eksternal berupa modernitas dan kolonialisme Eropa (Zürcher, 2017). Kekalahan dalam Perang Dunia I menjadi momen krusial yang memaksa sebagian besar wilayah Kesultanan diduduki oleh kekuatan Barat. Dalam dimensi teks, narasi kekalahan ini digunakan oleh kekuatan kolonial untuk meminggirkan simbol-simbol kekuasaan Islam, yang dianggap tidak kompatibel dengan modernitas. Dalam praktik diskursif, kekalahan ini juga menciptakan ruang bagi munculnya gerakan nasionalis yang menolak pemerintahan berbasis syariat Islam.

Mustafa Kemal, seorang perwira militer, memanfaatkan momen ini untuk memimpin perjuangan melawan kekuatan asing dan membangun landasan bagi republik baru. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional Erzurum tahun 1919, ia menyatakan, *"Bangsa ini tidak bisa bangkit dengan menggantungkan harapannya pada agama atau kekhalifahan; kita harus memimpin dengan akal dan ilmu pengetahuan"* (Ahmad, 2022). Dalam dimensi teks, penggunaan istilah *"akal dan ilmu pengetahuan"* menggambarkan upaya untuk mendekonstruksi otoritas agama sebagai sumber legitimasi politik. Praktik diskursif ini melahirkan proyek nasionalisme Turki yang sekular dan modern, di mana agama secara sistematis dipinggirkan dari ruang publik.

Pendirian Republik Turki pada 29 Oktober 1923 menandai tonggak penting dalam sejarah Timur Tengah. Negara baru ini tidak hanya menghapus simbol-simbol kekhalifahan, tetapi juga memperkenalkan struktur negara-bangsa modern yang berlandaskan nasionalisme Turki (Kuru, 2009). Dalam dimensi praktik sosial, transisi ini menciptakan ketegangan antara negara dengan kelompok Islamis dan konservatif. Resistensi muncul dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan pembubaran ordo sufi dan organisasi religius, yang dianggap sebagai ancaman terhadap identitas tradisional

(Yavuz, 2009). Dalam praktik diskursif, langkah-langkah ini didukung oleh institusi militer dan birokrasi, yang menjadi pelaksana utama ideologi Kemalisme.

Reformasi Atatürk dirancang untuk mentransformasi Turki menjadi negara modern yang sesuai dengan nilai-nilai Barat. Dalam pidatonya, Atatürk menyatakan, *“Agama harus menjadi urusan pribadi, bukan alat untuk mengatur negara atau masyarakat”* (Zürcher, 2017). Dalam upaya mengisolasi agama dari kehidupan publik dan memosisikannya sebagai hambatan bagi kemajuan negara, retorika sekularisme Kemalis memimpin serangkaian tindakan fundamental. Langkah pertama dan paling signifikan adalah penghapusan Khilafah pada tahun 1924 serta pembubaran institusi pendidikan dan peradilan berbasis syariah (Ahmad, 1993). Tindakan ini secara efektif menempatkan institusi agama di bawah kendali negara, sementara hukum Islam digantikan oleh sistem hukum sipil yang diadaptasi dari Eropa, yang dianggap lebih rasional dan sesuai dengan proyek modernitas negara bangsa.

Di sektor pendidikan, reformasi Atatürk menciptakan sistem pendidikan yang sepenuhnya terpusat di bawah negara. Semua sekolah agama ditutup, dan generasi baru dididik tanpa referensi agama dalam kurikulum formal (Zürcher, 2017). Dalam dimensi praktik sosial, kebijakan ini menciptakan alienasi di kalangan masyarakat religius yang kehilangan akses ke pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Di ranah simbolik, aksara Arab digantikan oleh alfabet Latin, dan azan dalam bahasa Arab diganti dengan versi Turki pada 1932 sebagai bagian dari program nasionalisasi agama (Kuru & Stepan, 2012). Dalam upaya mengisolasi agama dari kehidupan publik dan memosisikannya sebagai hambatan bagi kemajuan negara, retorika sekularisme Kemalis memimpin serangkaian tindakan fundamental. Langkah pertama dan paling signifikan adalah penghapusan Khilafah pada tahun 1924 serta pembubaran institusi pendidikan dan peradilan berbasis syariah (Ahmad, 1993). Tindakan ini secara efektif menempatkan institusi agama di bawah kendali negara, sementara hukum Islam digantikan oleh sistem hukum sipil yang diadaptasi dari Eropa, yang dianggap lebih rasional dan sesuai dengan proyek modernitas negara bangsa. Intervensi negara terhadap ruang spiritual rakyat untuk membangun identitas nasional yang sekular ini menunjukkan bahwa politik sentralistik selalu mengintervensi identitas. Hal ini memiliki preseden historis dalam dunia Islam; seperti proses Arabisasi yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah di wilayah yang ditaklukkan, di mana politik identitas digunakan oleh penguasa untuk menormalisasi dan membenarkan kontrol terhadap identitas yang berbeda-beda (Ozkan, 2014).

Namun, semua reformasi ini dipaksakan secara top-down dan menggunakan otoritas negara secara tegas. Kemalisme tidak hanya diterapkan melalui kebijakan,

tetapi juga melalui propaganda media, kurikulum, dan militer. Enam prinsip Kemalisme—republikanisme, nasionalisme, populisme, statisme, sekularisme, dan reformisme—menjadi fondasi bagi pembangunan identitas nasional Turki (Kadıoğlu, 2005). Dalam dimensi praktik sosial, sekularisme yang diterapkan bukanlah pemisahan netral antara agama dan negara, melainkan subordinasi agama di bawah kontrol negara. Diyanet didirikan untuk mengawasi dan menyebarkan Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai Kemalisme dan modernisme (Kuru, 2009).

Meskipun negara berhasil mengontrol institusi keagamaan formal, praktik keagamaan tetap bertahan dalam ruang privat dan komunitas lokal. Masyarakat di pedesaan dan kelompok Islam tradisional mempertahankan ritual, madrasah informal, dan nilai-nilai Islam meskipun di bawah tekanan (Yavuz, 2009). Dalam dimensi praktik sosial, kebijakan sekularisasi negara menciptakan rasa keterpinggiran di kalangan masyarakat konservatif. Penekanan terhadap ekspresi religius seperti jilbab, kegiatan tarekat, dan pendidikan agama formal melahirkan kesadaran identitas yang berbasis pada keislaman sebagai bentuk resistensi terhadap negara.

Gerakan sosial Islam seperti *Nurcu* (pengikut Said Nursi) dan *Süleymançı* mulai berkembang sebagai respon terhadap kebijakan Kemalisme. Kelompok-kelompok ini menggunakan jaringan pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk membangun basis ideologis di luar kendali negara. Dalam pidatonya, Said Nursi menyatakan, "*Ilmu pengetahuan dan iman tidak boleh dipisahkan; mereka adalah kekuatan yang membebaskan manusia dari kebodohan*" (Yavuz, 2009). Retorika ini menantang narasi sekular negara dengan memadukan elemen religius dan rasionalitas sebagai alternatif.

Ketika sistem demokrasi multipartai diberlakukan kembali pada 1950-an, kelompok-kelompok ini mulai memasuki arena politik. Dalam dimensi praktik sosial, perubahan ini memberikan ruang bagi kelompok Islamis untuk menantang hegemoni Kemalisme. Identitas Islam menjadi modal politik yang digunakan untuk mendapatkan dukungan di pedesaan dan komunitas konservatif (Kuru, 2009). Dengan demikian, meskipun Kemalisme berhasil mendominasi selama beberapa dekade, resistensi Islamis terus berkembang hingga menjadi kekuatan sosial-politik yang signifikan di Turki modern.

Namun, kekuatan baru yang muncul bukan hanya terletak pada perolehan suara di parlemen, melainkan pada ruang-ruang publik yang saling berkelindan di luar kontrol negara selama periode 1950 hingga 2000. Fenomena ini didorong oleh dua faktor utama: pertama, munculnya "Macan Anatolia" (*Anatolian Tigers*), yaitu kelas bisnis konservatif yang tumbuh di luar elit Kemalis lama di Istanbul dan Ankara.

Kelompok ini menyediakan basis ekonomi dan infrastruktur bagi gerakan keagamaan (Tuğal, 2009). Kedua, penguatan jaringan keagamaan (*cemaat*), seperti *Nurcu* dan *Süleymançı*, yang memanfaatkan kekosongan pendidikan moral dan keagamaan di sekolah-sekolah sekular. *Cemaat* ini berhasil mengorganisasi diri dan mengisi ruang sipil, membentuk identitas Islam yang terinstitusionalisasi secara non-negara dan mengkonsolidasikan dukungan politik, yang pada akhirnya memberi landasan sosial yang solid bagi kemenangan politik Islam di masa depan (Yavuz, 2009).

3.2. Transisi Politik dan Perubahan Identitas Keagamaan di Turki

Kemunculan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada tahun 2001 menandai babak baru dalam lanskap politik Turki modern. AKP berakar pada tradisi gerakan Islamis seperti *Refah Partisi* (Partai Kesejahteraan) dan *Fazilet Partisi* (Partai Kebajikan), yang sebelumnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme. Dalam dimensi teks, keputusan untuk membubarkan partai-partai tersebut menunjukkan bagaimana wacana sekularisme digunakan untuk membingkai Islam politik sebagai ancaman terhadap sistem politik yang demokratis. Dalam praktik diskursif, negara memanfaatkan institusi hukum sebagai alat untuk mempertahankan narasi sekular yang dominan, sehingga membatasi ruang politik bagi kelompok Islamis.

Namun, AKP berhasil memposisikan diri sebagai partai konservatif-demokrat, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan komitmen terhadap demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Recep Tayyip Erdoğan, tokoh sentral dalam pendirian AKP dan mantan wali kota Istanbul, menjadi simbol transformasi strategi Islam politik di Turki. Dalam pidatonya saat mendirikan AKP, Erdoğan menyatakan, "*Kami bukanlah ancaman bagi sekularisme. Kami adalah pelindung demokrasi yang berbasis pada moralitas*" (White, 2014). Narasi ini menciptakan identitas baru yang menggambarkan AKP sebagai partai yang moderat, sekaligus menarik dukungan dari kalangan urban dan kelas menengah religius yang merasa terpinggirkan oleh sekularisme negara (Kuru & Stepan, 2012). Strategi ini memungkinkan AKP untuk memperluas basis dukungannya di luar segmen tradisional, termasuk kelompok bisnis konservatif yang mendukung agenda ekonomi pasar bebas.

Selama dekade pertama kekuasaannya (2002–2011), AKP menunjukkan wajah moderat dengan agenda reformasi, penguatan hak individu, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi liberal. Retorika yang digunakan oleh Erdoğan dan para pemimpin AKP berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi

dengan Eropa. Misalnya, Erdoğan sering menyebut “stabilitas dan pembangunan” sebagai pilar utama keberhasilan pemerintahannya (Kuru, 2009). Narasi ini tidak hanya menarik perhatian dalam negeri, tetapi juga mendapat sambutan positif dari komunitas internasional. AKP memanfaatkan narasi ini untuk memuluskan jalan bagi reformasi legislatif, seperti pembatasan pengaruh militer dalam politik dan liberalisasi ekonomi.

Namun, dinamika politik berubah drastis pasca kudeta militer yang gagal pada tahun 2016. Peristiwa ini digunakan oleh Erdoğan untuk memperkuat kontrol terhadap lembaga-lembaga negara, mereduksi kebebasan sipil, dan meningkatkan sentralisasi kekuasaan. Dalam pidatonya setelah kudeta, Erdoğan menyatakan, “*Kita harus membersihkan negara ini dari musuh-musuh Islam dan demokrasi*” (Baykan, 2018). Hal ini menciptakan wacana yang menyatukan nilai-nilai Islam dengan agenda politik yang represif. Peristiwa ini juga membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan, di mana AKP memperkuat pengaruhnya melalui lembaga-lembaga religius seperti Direktorat Urusan Agama (*Diyanet*), yang memainkan peran penting dalam menyebarkan narasi pro-pemerintah.

Transformasi ini menunjukkan pergeseran AKP dari partai konservatif moderat menuju kekuatan Islamis konservatif yang secara aktif merekonstruksi identitas nasional Turki. Salah satu strategi utamanya adalah reinterpretasi identitas nasional melalui kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam. Di sektor pendidikan, kurikulum mulai menekankan nilai-nilai moral Islam, sekaligus mengurangi narasi yang mengkritisi masa lalu Ottoman atau mengagungkan Kemalisme (Tuğal, 2009). Dalam dimensi praktik sosial, reformasi ini mencerminkan upaya untuk membentuk pemahaman kolektif tentang sejarah yang lebih selaras dengan visi Islamis. Dalam praktik diskursif, wacana ini diproduksi melalui regulasi pendidikan dan propaganda media yang dikelola oleh pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat pengaruhnya terhadap media arus utama dan mendorong pertumbuhan media konservatif pro-pemerintah. Simbol-simbol Islam yang sebelumnya ditekan selama era sekularisme kini dihidupkan kembali. Misalnya, legalisasi jilbab di institusi negara dan pengubahan kembali fungsi Hagia Sophia menjadi masjid digunakan sebagai alat simbolis untuk menegaskan kemenangan ideologis atas warisan sekularisme (Yenigun, 2021). Erdoğan sering menyebut langkah ini sebagai “*upaya untuk menghormati sejarah Islam kita*” (Ozkan, 2014). Kebijakan ini mempertegas dominasi simbol keagamaan dalam ruang publik dan menciptakan polarisasi dengan kelompok sekular yang melihatnya sebagai ancaman terhadap pluralisme.

Namun, upaya ini tidak luput dari kritik. Kalangan sekuler, kelompok minoritas, dan oposisi politik, memandang langkah-langkah Erdoğan sebagai bentuk politisasi agama yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Narasi tentang “melindungi Islam” sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah (Zarakol, 2010). Dalam praktik diskursif, pemerintah memanfaatkan retorika ini untuk memperkuat kontrol terhadap media, lembaga yudikatif, dan organisasi masyarakat sipil. Ketegangan ini mencerminkan medan pertarungan ideologis yang terus berlangsung, di mana agama digunakan sebagai instrumen sentral dalam pembentukan narasi kebangsaan baru di Turki.

Berangkat dari konteks historis yang lebih panjang, tarikan antara sekularisme dan Islamisme di Turki telah dibentuk jauh sebelum era AKP dan bahkan era Republik. Upaya pemutusan institusional agama–negara dimulai sejak Reformasi Tanzimat pada pertengahan abad ke-19 yang memperkenalkan sistem hukum dan pendidikan sekular di samping institusi agama, dan kemudian dipercepat oleh Revolusi Turki Muda pada tahun 1908 yang menguatkan gagasan sentralisasi negara (Zürcher, 2017). Lintasan sejarah ini kemudian diperkokoh oleh Atatürk melalui penghapusan Khilafah (1924), pembaruan hukum sipil, dan pembentukan Diyanet sebagai instrumen kontrol negara atas agama—model *assertive secularism* yang menyeparkan kanalisisasi ekspresi keagamaan ke bawah otoritas negara (Kuru, 2009). Sejak demokratisasi elektoral 1950-an, rezim sekularisme ini berulang kali dinegosiasikan: pelonggaran simbolik di era Demokrat Partisi, intervensi militer 1960/1980 yang menata ulang batas agama–negara, hingga “kudeta pascamodern” 1997 yang membubarkan Refah dan menormalisasi larangan jilbab di ruang negara (Ceran, 2023; Jenkins, 2008).

Polarisasi makin mengeras ketika Islam politik bertransformasi menjadi kekuatan elektoral yang memanfaatkan bahasa demokrasi, kesejahteraan, dan moralitas publik, sementara negara mempertahankan hierarki kewargaan lewat regulasi agama dan wacana keamanan (Esen & Gumuscu, 2025; Ozkan, 2014). Praktik simbolik–institusional—dari kurikulum, regulasi moral, hingga politik neo-Ottomanisme—membentuk horizon identitas nasional dan ruang partisipasi minoritas religius, sekaligus memicu resistensi gerakan progresif dan masyarakat sipil yang mengartikulasikan narasi tandingan di media dan academia (Öktem & Tezcür, 2020). Dengan demikian, periode kontemporer tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan negosiasi panjang atas batas-batas sekular dan religius dalam proyek kebangsaan Turki (Kuru, 2009; Zürcher, 2017).

3.3. Polarisasi di Ruang Publik Turki Kontemporer

Dinamika antara sekularisme dan Islamisme menjadi salah satu ciri paling mencolok dalam lanskap politik dan sosial Turki kontemporer, terutama di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan. Salah satu medan utama kontestasi ini adalah simbol-simbol keagamaan yang mencakup pakaian religius, praktik ibadah, hingga kebijakan pendidikan. Pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, kebijakan sekular menyingkirkan ekspresi keagamaan dari ruang publik, seperti pelarangan jilbab di institusi negara dan larangan azan dalam bahasa Arab (1932–1950). Langkah-langkah ini dilihat sebagai upaya untuk memodernisasi negara dengan meminggirkan simbol-simbol religius yang dianggap sebagai penghalang kemajuan. Penggunaan istilah seperti “modernitas” dan “rasionalitas” dalam pidato-pidato Atatürk membingkai agama sebagai hambatan bagi pembangunan bangsa. Narasi ini diperkuat melalui kebijakan negara yang menghilangkan elemen-elemen agama dari kehidupan publik, termasuk dalam lembaga pendidikan dan hukum (Tuğal, 2009).

Namun, di era Erdoğan, terjadi pembalikan besar terhadap wacana ini. Jilbab kembali dilegalkan di seluruh institusi publik, azan Arab kembali dikumandangkan, dan kurikulum pendidikan agama diperluas. Dalam dimensi praktik diskursif, langkah ini didukung oleh kebijakan negara yang memperkuat peran lembaga seperti Diyanet, yang kini mendapatkan anggaran signifikan untuk memperluas pengaruhnya di bidang sosial dan politik. Revitalisasi simbol-simbol keagamaan ini dianggap sebagai upaya untuk memulihkan identitas Islam yang sebelumnya dimarjinalkan. Perubahan ini menciptakan ketegangan antara kelompok religius-konservatif yang merayakan kebijakan ini sebagai “pembebasan” dari warisan sekularisme, dan kelompok sekular yang melihatnya sebagai ancaman terhadap pluralisme dan nilai-nilai republikan (Kuru, 2009).

Perubahan ini mencapai puncaknya dalam keputusan kontroversial Erdoğan untuk mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid pada tahun 2020. Dalam pidatonya, Erdoğan menyebut langkah ini sebagai “upaya untuk menghormati sejarah Islam kita yang agung”. Keputusan ini menciptakan polarisasi yang mendalam di masyarakat. Pendukungnya menganggap ini sebagai kemenangan spiritual dan simbolis bagi kelompok Islamis, sementara kritikus melihatnya sebagai eksploitasi agama demi keuntungan politik elektoral. Dalam dimensi teks, retorika Erdoğan menonjolkan nilai-nilai Islam sebagai bagian integral dari identitas nasional, berlawanan dengan warisan sekular Atatürk yang berusaha menghapus simbolisme religius dari ruang publik (Yavuz, 2020).

Hagia Sophia sendiri bukan hanya situs ibadah, melainkan simbol sejarah yang kompleks antara Islam, Kristen, dan sekularisme global. Keputusan untuk mengubah statusnya kembali menjadi masjid menunjukkan bagaimana simbol keagamaan dapat digunakan untuk menciptakan hegemoni ideologis. Dalam dimensi praktik sosial, langkah ini mempertegas pergeseran narasi identitas Turki menuju politik identitas berbasis agama. Di sisi lain, pembangunan masjid-masjid besar seperti Masjid Çamlica di Istanbul juga mencerminkan hegemoni visual dan simbolik Islam dalam ruang kota. Dengan lokasi strategis dan arsitektur megah bergaya Ottoman, masjid ini menjadi representasi fisik dari kebangkitan identitas Islam dalam lanskap urban Turki (Baykan, 2018).

Simbolisasi ini diperkuat oleh proyek moral negara yang dibangun lewat wacana gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Erdoğan secara konsisten mendorong pandangan konservatif terhadap perempuan sebagai penjaga moral keluarga dan pelengkap peran domestik. Pandangan ini sering disampaikan melalui pidato yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam “mempertahankan nilai-nilai keluarga.” Sementara legalisasi jilbab membuka akses perempuan religius ke ruang publik dan institusi negara, otonomi perempuan dalam ruang profesional dan sosial tetap dibatasi oleh norma moral yang dikontrol negara (White, 2014). Dalam dimensi diskursif, narasi ini diproduksi melalui regulasi budaya, kebijakan pendidikan, dan penyensoran media, menciptakan hegemoni nilai-nilai Islam konservatif dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan nilai moral Islam juga dilakukan melalui penyensoran media, regulasi konten hiburan, dan pembatasan seni yang dinilai tidak sesuai dengan “nilai-nilai keluarga”. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi konten budaya, tetapi juga membingkai wacana tentang kebebasan berekspresi sebagai sesuatu yang harus tunduk pada norma-norma moral negara. Langkah-langkah ini menciptakan kontrol ketat terhadap budaya dan ekspresi publik, membatasi ruang bagi kelompok sekular dan seniman independen. Polarisasi ini tidak hanya soal perbedaan ideologi, tetapi juga menyangkut soal identitas nasional: apakah Turki akan tetap sekular dalam semangat Eropa atau kembali ke akar-akar religius Ottoman (Casanova, 1994; Tuğal, 2009).

Ketegangan ini memuncak dalam peristiwa seperti Gezi Park 2013, di mana demonstrasi warga sekular terhadap otoritarianisme dan konservatisme religius negara ditanggapi secara represif oleh pemerintah. Erdoğan menyebut gerakan ini sebagai “upaya untuk melemahkan Islam dan moralitas bangsa kita,” yang menunjukkan bagaimana narasi anti-Islam digunakan untuk mendiskreditkan oposisi

(Casanova, 1994). Dalam dimensi diskursif, wacana ini memperkuat posisi pemerintah sebagai pelindung nilai-nilai Islam sekaligus membungkam kritik. Sementara itu, generasi muda sekular menggunakan platform seperti Twitter dan Instagram untuk menyuarakan perlawanan. Media sosial menjadi ruang alternatif bagi narasi tandingan terhadap hegemoni negara.

Namun, pemerintah merespons dengan memperketat regulasi dan pengawasan terhadap internet dan konten digital. Langkah ini menciptakan medan pertarungan baru antara kebebasan berekspresi dan dominasi wacana keagamaan negara. Ruang publik Turki—baik fisik maupun virtual—telah menjadi medan utama perebutan nilai antara dua kutub ideologis. Polarisasi yang terus berlangsung ini mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks, di mana konflik antara sekularisme dan Islamisme berakar dalam sejarah dan terus berkembang seiring perubahan kebijakan dan konteks global. Gambaran opini publik menunjukkan polarisasi yang konsisten: survei Pew Research Center pada awal 2024 menemukan 55% warga Turki menilai Erdoğan secara tidak menguntungkan dan 43% menguntungkan, dengan dukungan relatif lebih tinggi di kelompok usia 50+ dan pada responden yang lebih religius (Clancy, Poushter, & Hernandez Ramones, 2024).

Di sisi lain, legasi Atatürk tetap sangat positif di benak publik; dalam jajak pendapat MetroPOLL (Oktober 2023), 86% responden menyatakan bersyukur atas jasa Atatürk (Sencar, 2023). Sejalan dengan itu, ringkasan Ipsos (2023) tentang “Seratus Tahun Republik” menunjukkan lebih dari separuh responden menyetujui pernyataan bahwa “Türkiye adalah negara sekuler; hal ini tidak untuk diperdebatkan”, sementara sekitar seperlima tidak setuju, menandakan kontestasi makna sekularisme di ruang publik; Ipsos juga mencatat asimetris kepuasan demokrasi (42% menilai “berhasil”, 42% “gagal”) dan ekspektasi polarisasi yang tetap tinggi ke depan (Gedik, 2023). Data-data ini menegaskan bahwa pertarungan wacana antara sekularisme dan Islamisme tidak hanya berlangsung di aras institusi, melainkan juga tercermin jelas pada preferensi nilai, identitas politik, dan pembelahan generasi dalam masyarakat Turki kontemporer (Clancy et al., 2024; Gedik, 2023; Sencar, 2023).

3.4. Dinamika Politik Turki: Membandingkan Atatürk dan Erdoğan

Turki telah mengalami perubahan ideologis yang mendalam dalam relasi antara agama dan negara, terutama dalam cara Mustafa Kemal Atatürk dan Recep Tayyip Erdoğan membentuk identitas politik bangsa. Atatürk mengusung ideologi Kemalisme yang menjadikan sekularisme sebagai dasar negara modern. Melalui

kebijakan seperti pembubaran Kekhalifahan dan penghapusan hukum Islam, ia menekankan pemisahan tegas antara institusi keagamaan dan pemerintahan (Ahmad, 1993). Narasi sekularisme Atatürk kerap menggunakan istilah seperti “modernitas” dan “rasionalitas” untuk menggambarkan agama sebagai hambatan bagi kemajuan. Kebijakan ini, seperti pelarangan simbol agama di ruang publik, tidak hanya berfungsi untuk mendisiplinkan masyarakat, tetapi juga menciptakan wacana yang membingkai sekularisme sebagai satu-satunya jalan menuju peradaban yang maju.

Sebaliknya, Erdoğan memperkenalkan pendekatan yang jauh lebih inklusif terhadap agama dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara dan identitas nasional. Wacananya, yang sering diiringi oleh istilah seperti “kebangkitan Islam” dan “Neo-Ottomanisme,” menekankan bahwa agama dapat menjadi fondasi moral dan politik yang sah (Yavuz, 2020). Retorika ini tidak hanya membangun legitimasi politik, tetapi juga menawarkan narasi tandingan terhadap Kemalisme, yang dianggap terlalu elitis dan mengabaikan akar budaya masyarakat mayoritas Muslim. Melalui langkah-langkah seperti legalisasi jilbab dan revitalisasi simbol-simbol keagamaan, Erdoğan menciptakan ruang bagi agama untuk memainkan peran penting dalam politik dan masyarakat.

Namun, meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap agama, mereka berbagi kesamaan dalam hal otoritarianisme dan kontrol politik. Atatürk, meskipun memimpin dengan cita-cita modernitas, membangun sistem pemerintahan yang sangat sentralistik untuk menjaga keberlangsungan proyek sekularismenya. Ia menggunakan wacana modernisasi untuk membatasi ruang oposisi dan mengontrol masyarakat melalui kebijakan koersif, seperti penutupan madrasah dan penghapusan simbol agama. Wacana ini, yang didukung oleh militer dan lembaga negara, memosisikan sekularisme sebagai keharusan bagi stabilitas dan kemajuan nasional.

Demikian pula, Erdoğan, meskipun terpilih secara demokratis, telah memusatkan kekuasaan melalui amandemen konstitusi dan kontrol terhadap media serta oposisi politik. Retorika populisme religiusnya sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan represif, seperti kriminalisasi kritik politik dan penyensoran media. Sementara Atatürk membangun otoritarianisme atas nama modernitas sekular, Erdoğan menggunakan narasi keagamaan untuk menyatukan pendukungnya dan membungkam lawan politik. Dalam kedua era, kontrol terhadap ruang publik dan kebebasan berpendapat menjadi ciri utama dari praktik politik mereka (White, 2014).

Pergeseran naratif dari Kemalisme ke Neo-Ottomanisme semakin mencerminkan perbedaan ideologis yang mendalam ini. Kemalisme menolak warisan Ottoman

sebagai simbol keterbelakangan dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan modernitas. Wacana ini diproduksi melalui lembaga pendidikan dan media yang menghapus simbol-simbol agama dari ruang publik (Ahmad, 1993). Sebaliknya, Erdoğan merevitalisasi simbol-simbol Ottoman dengan menggambarkan masa lalu kekhalifahan sebagai sumber kebanggaan nasional. Simbol seperti Hagia Sophia, yang diubah dari museum menjadi masjid, menjadi alat penting dalam membangun narasi kebangkitan Islam yang sesuai dengan visi politiknya. Analisis ini menautkan reformasi kebebasan beragama dan politik simbolik dengan dampak keseharian yang konkret. Ekspansi peran Diyanet dan normalisasi simbol keagamaan di ruang publik tidak hanya mengubah horizon identitas, tetapi juga memengaruhi akses layanan sosial berbasis agama, pola konsumsi budaya, serta praktik kerja di sektor publik–privat. Perubahan kurikulum dan regulasi moral negara berimplikasi pada trajektori pendidikan dan mobilitas gender—mulai dari perluasan akses bagi perempuan berkerudung di institusi negara hingga penguatan norma keluarga yang membatasi otonomi profesional dalam sejumlah konteks lokal.

Pada ranah ekonomi politik, koalisi bisnis konservatif yang berjejaring dengan pemerintah mendorong reorientasi patronase dan peluang usaha, menguntungkan sebagian pelaku pasar sambil menekan kompetitor di ekosistem media, seni, dan hospitality melalui regulasi konten dan alkohol . Secara bersamaan, polarisasi dan kontrol atas ruang digital menimbulkan biaya sosial: erosi kepercayaan antarkelompok, segmentasi pasar tenaga kerja berbasis identitas, serta beban kepatuhan yang lebih tinggi bagi lembaga swadaya masyarakat atau komunitas minoritas (Esen & Gumuscu, 2025). Dengan demikian, praktik politik keagamaan dan kebijakan negara tidak berhenti pada level simbolik, tetapi mewarnai ritme hidup sehari-hari—dari sekolah dan kantor hingga pasar, media, dan jaringan dukungan sosial—dengan hasil yang ambivalen: inklusi baru bagi sebagian warga, sekaligus eksklusif dan ketidakpastian bagi yang lain.

Di bawah Erdoğan, narasi neo-Ottomanisme tidak hanya berfungsi untuk menghidupkan kembali identitas keagamaan, tetapi juga untuk memperkuat pengaruh Turki di kancah internasional. Pembangunan masjid-masjid besar, seperti Masjid Çamlıca di Istanbul, dan retorika tentang solidaritas Muslim global menjadi bagian integral dari upaya untuk menciptakan citra “Turki Baru” (Yavuz, 2020). Narasi ini sering kali digunakan untuk mengimbangi kritik terhadap pemerintah dengan mengedepankan simbol-simbol keagamaan sebagai representasi moralitas dan keadilan. Namun, pergeseran ini juga memicu ketegangan antara kelompok sekular dan religius di Turki.

Tantangan terhadap pluralisme dan demokrasi menjadi isu sentral di kedua era ini. Sekularisme Atatürk, yang menggunakan wacana modernitas untuk meminggirkan identitas keagamaan, mengabaikan kebutuhan spiritual masyarakat mayoritas Muslim. Di sisi lain, Islamisme Erdoğan menciptakan eksklusivitas baru yang menggambarkan sekularisme sebagai ancaman terhadap moralitas publik dan kesatuan nasional. Kedua narasi ini, meskipun berlawanan, sama-sama menekan pluralisme dengan membatasi ruang bagi perbedaan ideologis.

Dalam konteks ini, relasi antara agama dan negara di Turki mencerminkan upaya untuk membangun identitas nasional yang homogen. Atatürk berusaha menciptakan negara modern yang berbasis pada nilai-nilai Barat, sedangkan Erdoğan mencoba merekonstruksi negara berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, dalam praktiknya, keduanya memperlihatkan bagaimana wacana ideologis digunakan untuk memelihara kekuasaan, sering kali dengan mengorbankan kebebasan individu dan hak-hak minoritas (White, 2014). Pluralisme dan demokrasi menjadi korban utama dari konflik antara sekularisme dan Islamisme ini.

Di tengah ketegangan ini, masa depan demokrasi di Turki sangat bergantung pada kemampuan masyarakat sipil untuk menantang narasi dominan dari kedua kutub ideologis ini. Kelompok-kelompok masyarakat sipil, media independen, dan organisasi hak asasi manusia memiliki peran penting dalam memperjuangkan keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak sipil. Konsensus sosial yang inklusif diperlukan untuk menciptakan tatanan politik yang mampu mengakomodasi keberagaman ideologi tanpa mengorbankan pluralitas.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi Turki adalah menciptakan visi negara yang mampu menyeimbangkan antara sekularisme dan Islamisme tanpa mengorbankan kebebasan individu dan pluralitas. Relasi antara agama dan negara tidak hanya menyangkut kebijakan, tetapi juga bagaimana identitas nasional dibangun dan dipertahankan. Dalam konteks globalisasi dan kebangkitan politik identitas, Turki perlu menemukan jalan tengah yang menjamin demokrasi yang sehat dan inklusif (Tuğal, 2009).

4. SIMPULAN

Dinamika hubungan agama–negara di Turki tidak dapat dipahami sekadar sebagai pertentangan antara sekularisme dan Islamisme, tetapi sebagai dua strategi ideologis yang sama-sama menggunakan negara sebagai produsen identitas nasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Atatürk maupun Erdoğan tidak berada pada dua kutub yang benar-benar bertentangan; keduanya justru menyandarkan legitimasi kekuasaannya pada narasi besar yang memonopoli tafsir tentang “ke-Turki-an” dan memarginalkan posisi kelompok yang tidak sesuai dengan ideologi negara yang dominan. Dalam hal ini, kontribusi artikel ini terletak pada penunjukan bahwa “sekularisme Turki” dan “Islamisme Turki” bekerja dengan logika politik yang identik: otoritarianisme simbolik. Yang membedakan bukan struktur kekuasaan, tetapi sumber simbol yang dijadikan rujukan. Atatürk menginstitusionalisasi modernitas-Barat sebagai horizon nasionalitas, sedangkan Erdoğan memulihkan simbol dan memori Ottoman sebagai horizon baru identitas bangsa. Dengan demikian, pertarungan ideologis antara keduanya bukanlah pergulatan nilai yang setara, melainkan kontestasi memperebutkan otoritas kultural untuk mendefinisikan batas-batas bangsa.

Implikasinya, masa depan relasi agama–negara di Turki tidak dapat diselesaikan dengan memilih salah satu ekstrem, tetapi menuntut model baru yang melampaui dikotomi Kemalisme vs Islamisme. Arah pembaruan yang lebih relevan adalah bagaimana menghasilkan desain hubungan agama–negara yang memungkinkan pluralitas simbol, bukan monopoli interpretasi. Di titik inilah demokrasi — bukan sekularisme maupun Islamisme — seharusnya menjadi kerangka kerja utama untuk menyusun ulang relasi identitas nasional Turki. Penelitian ini membuka ruang untuk kajian lanjutan, khususnya mengenai bagaimana kelompok minoritas dan masyarakat sipil merespons otoritarianisme simbolik di tingkat akar rumput. Komparasi dengan negara mayoritas Muslim lain (misalnya Iran, Indonesia, Mesir) juga penting untuk melihat apakah pola Turki bersifat unik atau justru representatif dari kecenderungan politik agama kontemporer. Pendekatan etnografi dan kajian budaya populer dapat menjadi strategi metodologis yang lebih sensitif untuk memetakan reproduksi ideologi di ruang publik.

REFERENSI

- Ahmad, F. (1993). *The making of modern Turkey* (Vol. 264). Routledge London. <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/53981/1/49.pdf.pdf>
- Ahmad, D. A. (2022). The Muslim Reawakening in the 19th Century Pak-Hind Sub-Continent: An Overview. *Hamdard Islamicus*, 45(1). <https://www.hamdardislamicus.com.pk/index.php/hi/article/view/412>
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of*

- Nationalism* (Revised ed.). Verso.
- Aydın, C. (2007). *The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic and Pan-Asian Thought*. Columbia University Press.
- Bayat, A. (2007). *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9781503626485>
- Baykan, T. S. (2018). *The justice and development party in Turkey: Populism, personalism, organization*. Cambridge University Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZnaIDwAAQBAJ>
- Berger, P. L. (1999). *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Berkes, N. (1998). *The Development of Secularism in Turkey*. Routledge.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=roJ4ipuAAFEC>
- Ceran, F. (2023). *From Democratization to Security Politics: The Transformation of Turkey's Justice and Development Party*. Transnational Press London. <https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1101266>
- Çinar, A. (2005). *Modernity, Islam, and secularism in Turkey: Bodies, places, and time* (Vol. 14). U of Minnesota Press.
- ÇINAR, M., Bilecenğlu, M., ÖZTÜRK, B., Katağan, T., Yokeş, M. B., Aysel, V., DAĞLI, E., AÇIK ÇINAR, Ş., Özcan, T., & ERDOĞAN, H. (2011). An updated review of alien species on the coasts of Turkey. *Mediterranean Marine Science*, 12(2). <https://avesis.mku.edu.tr/yayin/0f3d0a0c-df50-4b7d-a69a-4813158216ef/an-updated-review-of-alien-species-on-the-coasts-of-turkey>
- Çinar, M. E., Arianoutsou, M., Zenetos, A., & Golani, D. (2014). Impacts of invasive alien marine species on ecosystem services and biodiversity: A pan-European review. *Aquatic Invasions*, 9(4), 391–423.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Davison, A. (1998). *Secularism and Revivalism in Turkey: A Hermeneutic Reconsideration*. Yale University Press.
- Esen, B., & Gumuscu, S. (2025). How to Fight Turkey's Authoritarian Turn. *Journal of Democracy*, 36(3), 106–120.
- Fairclough, N. (2023). Critical discourse analysis. Dalam *The Routledge handbook of discourse analysis* (hlm. 11–22). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003035244-3/critical-discourse-analysis-norman-fairclough>

- Gole, N. (1996). *The Forbidden Modern: Civilization and Veiling*. University of Michigan Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Sharia Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. Indiana University Press.
- Jenkins, G. (2008). *Political Islam in Turkey: Running West, Heading East?* Springer. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kdXGAAAAQBAJ>
- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=4912565&publisher=FZ7200>
- Kadioğlu, A. (2005). Civil society, Islam and democracy in Turkey: A study of three Islamic non-governmental organizations. *The Muslim World*, 95(1), 23–41.
- Kaya, A. (2020). *Populism and Neo-Ottomanism in Turkey*. Southeast European and Black Sea Studies, 20(1), 89–114. <https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1674166>
- Keyman, E. F., & Koyuncu, B. (2005). *Globalization, Alternative Modernities and the Political Economy of Turkey*. *Review of International Political Economy*, 12(1), 105–128.
- Kirdiş, E. (2023). Education, Media and Civil Society: The Building of an Islamic Cultural Hegemony in Turkey. *The International Spectator*, 58(1), 146–161. <https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2140504>
- Kuru, A., & Stepan, A. (2012). *Democracy, Islam, & Secularism in Turkey*. Columbia University Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=m8mrAgAAQBAJ>
- Kuru, A. T. (2009). *Secularism and state policies toward religion: The United States, France, and Turkey*. Cambridge University Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=UelQIS5mkGQC>
- Lewis, B. (1961). *The Emergence of Modern Turkey* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Öktem, K., & Tezcür, G. M. (2020). *Ruling ideologies in modern Turkey*. Oxford University Press Oxford. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=7CRXEAAAQBAJ>
- Ozkan, B. (2014). Turkey, Davutoglu and the Idea of Pan-Islamism. *Survival*, 56(4), 119–140. <https://doi.org/10.1080/00396338.2014.941570>
- Özpek, B. B., & Park, B. (2019). *Islamism, populism, and Turkish foreign policy*. Routledge London. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780429061509&type=googlepdf>
- Özdalga, E. (2005). *Redeeming Modernity Through Islam in Turkey*. *ISIM Review*, 15, 6–7.
- Ozturk, A. E. (2021). Islam and foreign policy: Turkey's ambivalent religious soft power in the authoritarian turn. *Religions*, 12(1), 38.

- Roy, O. (2017). Globalized Islam: The search for a new Ummah. *Islamology*, 7(1), 11–40.
- Tuğal, C. (2009). *Passive revolution: Absorbing the Islamic challenge to capitalism*. Stanford University Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=AzDgC9jAkiMC>
- Ugur-Cinar, M. (2023). Elections and Democracy in Turkey: Reconsidering Competitive Authoritarianism in the Age of Democratic Backsliding. *The Political Quarterly*, 94(3), 445–451. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13309>
- White, J. (2014). *Muslim Nationalism and the new Turks: Updated edition*. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5642428&publisher=FZO137>
- Yavuz, M. H. (2009). *Secularism and Muslim democracy in Turkey* (Vol. 28). Cambridge University Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=UoZRR0gUbJIC>
- Yavuz, M. H. (2020). *Islam, Populism and Regime Change in Turkey*. Routledge. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780429356636&type=googlepdf>
- Yenigun, H. I. (2021). Turkey as a Model of Muslim Authoritarianism? Dalam *Routledge Handbook of Illiberalism* (hlm. 840–857). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780367260569-60/turkey-model-muslim-authoritarianism-halil-ibrahim-yenigun>
- Zarakol, A. (2010). *After defeat: How the East learned to live with the West* (Vol. 118). Cambridge University Press. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=x3Y-8VJsPh4C>
- Zürcher, E. J. (2017). *Turkey: A modern history*. Bloomsbury Publishing. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=P7qKDwAAQBAJ>